LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL

PERIODE
JANUARI-DESEMBER
2024

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL

PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai salah satu PPID Pelaksana sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul, bertanggungjawab dalam pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Hal ini sekaligus menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan di dalamnya bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai PPID Pelaksana selama tahun 2024, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 051/DinsosBtl/I/2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Dinas Sosial.

PLID Dinas Sosial selanjutnya bertugas menghimpun, mengelola, dan memutakhirkan informasi, baik informasi publik maupun informasi yang dikecualikan, serta melaksanakan pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

   Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul menjadi satu dengan pelayanan umum di *Lobby* Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan di ruang Subbagian Umum dan Kepegawaian. Disediakan ruang tunggu dan formulir permohonan informasi sebagai kelengkapan persyaratan permohonan informasi publik. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.30 – 15.30 WIB setiap harinya.

Gambar 1. *Front office*

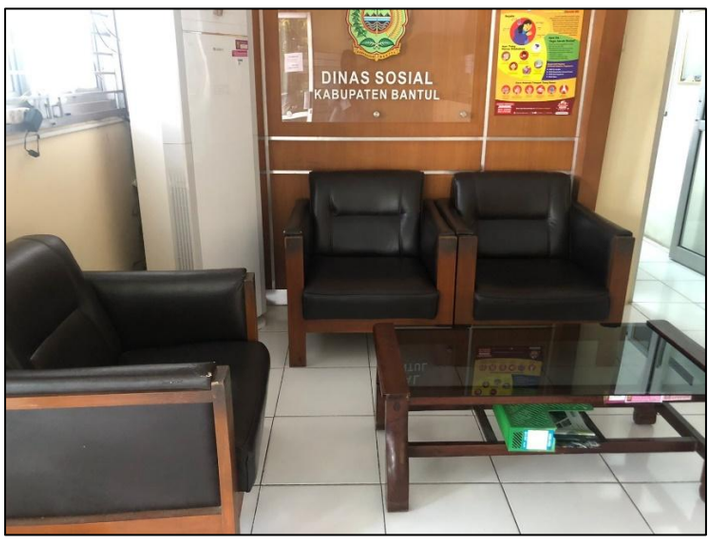

Gambar 2. Ruang tunggu pelayanan

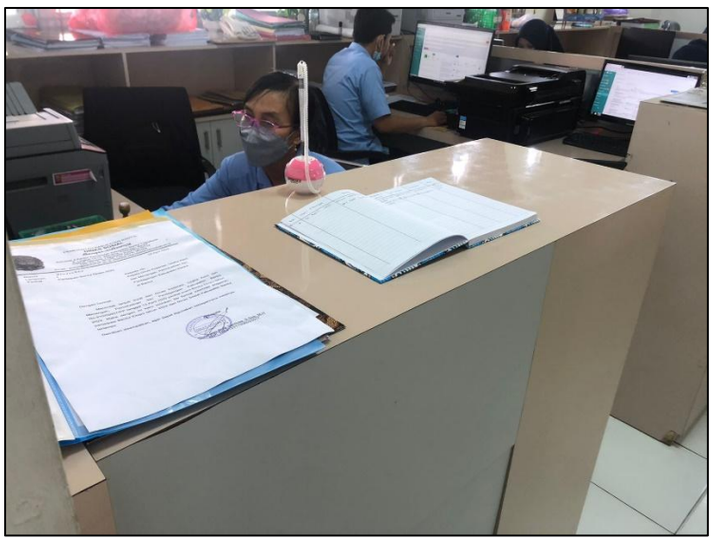

Gambar 3. Ruang pelayanan

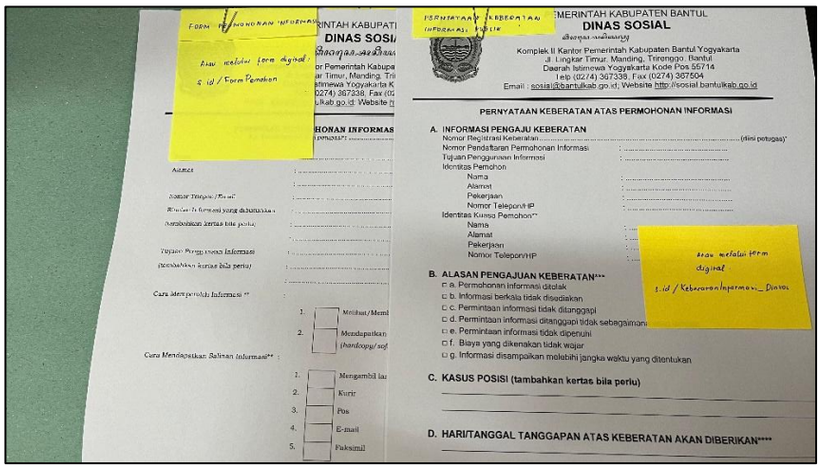

Gambar 4. Formulir permohonan informasi publik dan formulir keberatan informasi publik

Selain pelayanan tatap muka, penyediaan akses informasi publik Dinas Sosial Kabupaten Bantul selama tahun 2024 dapat diakses melalui:

a. Fax: (0274) 367504
b. Telepon: (0274) 367338
c. Email: sosial@bantulkab.go.id
d. Website: sosial.bantulkab.go.id
e. Instagram: @dinsos_bantul
f. Facebook: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Pemohon dapat mengisi formulir online melalui tautan s.id/FormPemohon dan mengirimkan KTP melalui email untuk selanjutnya permohonan informasi publik akan diproses. Tautan tersebut juga telah dipublikasikan pada website resmi Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada halaman berikut: https://sosial.bantulkab.go.id/hal/ppid-layanan-alur-permohonan-informasi-publik.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Susunan personil PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 051/DinsosBtl/I/2024 tentang Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Sosial, beserta kualifikasinya sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANG-AN	KUALIFIKASI
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Sosial	Penasehat	S2
2	PPID Pelaksana	Plt. Sekretaris Dinas Sosial	Ketua	S2
3	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 1. Septi Setio Lansih, S.Sos. 2. Marlisa, S.Sos. 3. Anastasia Claudia Silviana Kurniasari, S.Sos.	Koordinator Anggota Anggota Anggota	S1
4	Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat 2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Koordinator Anggota Anggota	S2 S1 S2
5	Dokumentasi dan Arsip	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1. Kasiyati 2. Surya Sukma Wardhany, A.Md.	Koordinator Anggota Anggota	S1 SLTA/SMA D3
6	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana 1. Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana 2. Kepala Seksi Rehabilitasi PPKS Lainnya	Koordinator Anggota Anggota	S2 S2 S1
7	Pengelola Website	Kepala Subbagian Program dan Keuangan 1. Fatimah Nur Hidayati, A.Md	Koordinator Anggota	S1 D3

4. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No. DPPA/A.4/1.06.2.22.4.01.01.0000/001/2024 Tanggal 28 November 2024

dalam Sub Kegiatan 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD kode rekening 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk mengakomodir kegiatan penyusunan SK PPID dan SK DIP serta persiapan pelaksanaan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu dialokasikan juga pada Sub Kegiatan 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada kode rekening 5.1.02.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak berupa Poster PPID yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan publikasi.

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan online melalui e-mail/website/media sosial dan melalui layanan tatap muka.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat selama tahun 2024, baik yang secara langsung maupun tidak langsung:

1	Jumlah permohonan informasi publik	4 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	> 5 hari kerja
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	2 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	2 permohonan tidak ditindaklanjuti karena berkas tidak lengkap

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode Januari – Desember 2024 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik. Berikut data sengketa informasi publik selama tahun 2024:

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan public	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan public	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi selama tahun 2024 tidak ada kendala eksternal yang berarti, namun ada beberapa masyarakat yang berkonsultasi atau memohon layanan menggunakan fitur “Hubungi Kami” dengan memilih opsi “Permohonan Informasi” yang mana seharusnya digunakan untuk permohonan informasi publik. Terdapat pula masyarakat yang menghendaki permohonan layanan seperti pencetakan surat keterangan DTKS tetapi mengisi formulir digital Permohonan Informasi Publik pada website.

Tetapi permasalah ini justru cukup membantu dalam menindaklanjuti aduan/konsultasi/permohonan layanan, karena opsi “Permohonan Informasi” dan pengisian formulir digital Permohonan Informasi Publik mengharuskan masyarakat mengunggah foto KTP yang bisa digunakan untuk pengecekkan data PPKS dalam menyelesaikan aduan/konsultasi/permohonan layanan.

2. Kendala internal

Pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Bantul selama tahun 2024 secara internal berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Seluruh pegawai bekerja sama dengan baik dalam pemenuhan permintaan informasi dari pemohon.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Berdasarkan kendala di atas, direkomendasikan rencana tindak lanjut berikut sebagai bentuk solusi yang diharapkan dapat meningkatkan layanan informasi pada tahun mendatang:

1. Sosialisasi rutin alur permintaan informasi dan alur konsultasi atau aduan, baik di website atau media konsultasi lain.
2. Meningkatkan kembali penerapan SOP pelayanan informasi publik dan pengarsipannya agar memudahkan pemohon dan petugas pelayanan dalam melacak permohonan informasi yang sudah diajukan.

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website dan media sosial	Januari – Desember
2	Menyusun SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari
4	Mengikuti Pembinaan PPID Pelaksana Se-Kabupaten Bantul	21 Februari 2024
5	Mengikuti Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Pubilk se-DIY Tahun 2024	10 Juli 2024
6	Mengikuti Desk pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Daerah DIY	25 Agustus 2024
7	Mengikuti Finalisasi pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik	9 September 2024
8	Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul	13 Desember 2024
9	Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik	Januari-Desember
10	Menyusun Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	Desember
11	Menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Bantul, Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS SOSIAL

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos., M.H.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196912311996031017

PPID Pelaksana

TATIK WINDARI, S.Sos., M.SE.
Pembina / IVa
NIP. 197203271991012001

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

Pembinaan PPID Pelaksana Se-Kabupaten Bantul

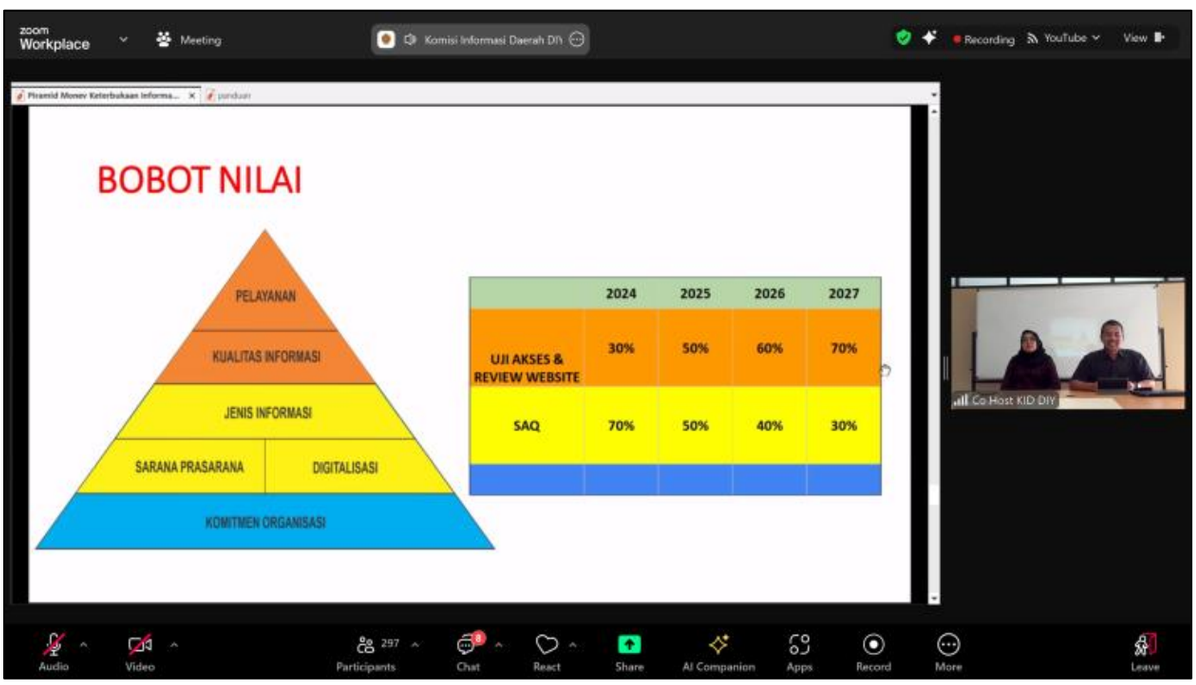

Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Pubilk se-DIY Tahun 2024

Desk pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Daerah DIY

Finalisasi pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024